

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Istilah "Keuangan Mikro" atau lebih dikenal dengan "*Microfinance*" dewasa ini begitu populer di dunia. Semenjak Jeffrey Sachs (2005) mengeluarkan ide-ide tentang pengentasan kemiskinan melalui tulisannya yang terkenal '*The End of Poverty*', isu kemiskinan menjadi semakin populer. PBB kemudian menetapkan keuangan mikro (*microfinance*) sebagai salah satu alat efektif pengurangan kemiskinan (*poverty reduction*), yakni bagian dari sasaran "*to eradicate extreme poverty and hunger*" (*The UN Eight Millenium Development Goals*) dan kemudian menetapkan tahun 2005 sebagai Tahun Keuangan Mikro.

Maria Otero (Accion International, 2000) menyebut *microfinance* sebagai singkatan dari "*microentreprise finance*" yang bisa diterjemahkan sebagai "pelayanan keuangan bagi usaha mikro". *Microfinance* juga didefinisikan sebagai penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro yang juga berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan (Joanna Ledgerwood, 1999). Sementara Robinson memberikan definisi *microfinance* sebagai layanan keuangan skala kecil khususnya kredit dan simpanan yg disediakan bagi mereka yang bergerak di sektor pertanian, perikanan atau peternakan; yang mengelola usaha kecil atau mikro yg meliputi kegiatan produksi, daur ulang, reparasi atau perdagangan; yang menyediakan layanan jasa; yang bekerja untuk memperoleh upah atau komisi; yang memperoleh penghasilan dari/dengan cara menyewakan tanah, kendaraan, tenaga hewan ternak, atau peralatan dan mesin-mesin; dan kepada perseorangan atau kelompok baik di pedesaan maupun di perkotaan di negara-negara berkembang (Marguerite Robinson; 2002)

CGAP (*consultative group to assist the poor*) mendefinisikan keuangan mikro sebagai pemberian pelayanan keuangan dasar kepada kaum miskin melalui kredit, tabungan, jasa pengiriman uang (*remittance*) dan asuransi mikro agar dapat menjalankan usaha-usahanya, membangun aset, melancarkan konsumsi dan

mengelola resiko. Secara spesifik mengenai Kredit Mikro, Microcredit Summit di Washington (1997) mendefinisikannya sebagai program pemberian kredit berjumlah kecil kepada masyarakat termiskin untuk membiayai kegiatan yang dilakukan sendiri dalam menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka menghidupi diri sendiri dan keluarganya.

Menurut Prof. Yunus, kredit merupakan hak asasi setiap manusia dan argumentasi bahwa orang-orang miskin tidak dapat mengakses kredit karena tidak memiliki kolateral adalah keliru.

*”Argumentasi bahwa sistem perbankan tidak dapat berhubungan dengan orang miskin karena ketiadaan kolateral, sama saja dengan mengatakan bahwa manusia tidak dapat terbang hanya karena tidak memiliki sayap” (Yunus, 1987, p. 4).*

Lebih lanjut, Yunus mengatakan:

*“Kesuksesan praktek keuangan mikro telah memaksa para ahli ekonomi untuk memikirkan ulang pandangan pesimistik tentang prospek dari keuntungan (laba) yang bisa diraih jika memberikan pinjaman kepada kaum miskin” (Yunus, 2003, p. 12).*

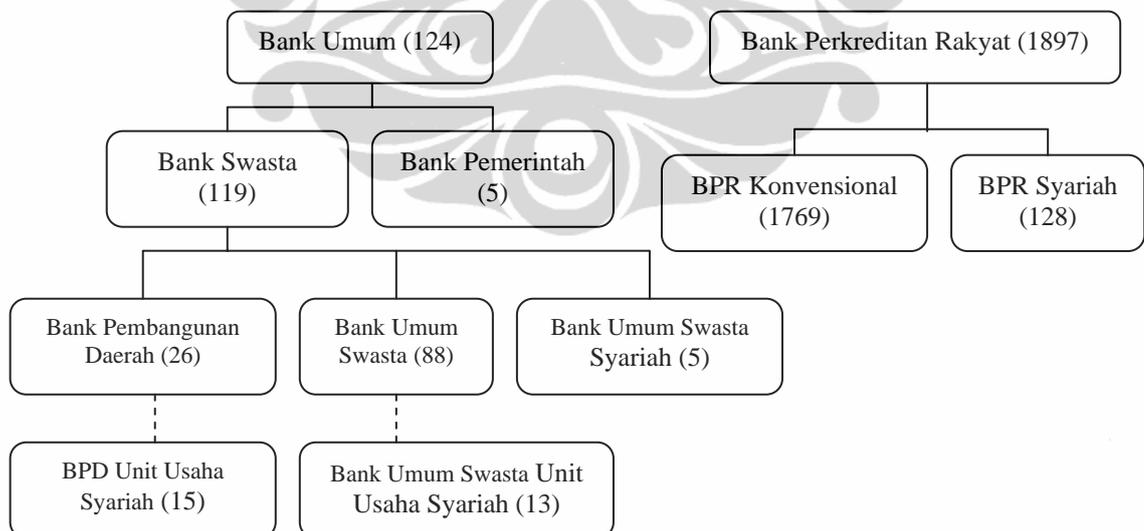
Namun, disamping harus mampu menghasilkan laba yang tinggi agar *sustainable* (Rosenberg, CGAP 1998), institusi keuangan mikro juga harus memiliki *social performance* (Otero, Accion 2007). Tujuan LKM sebagai ‘*development organization*’ adalah melayani kebutuhan keuangan dari pasar yang tak terlayani dan terabaikan (*unserved and undeserved markets*) sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan (Ledgerwood, 1999).

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa institusi/lembaga keuangan mikro (LKM) memiliki peran yang unik/strategis yakni bertujuan memberikan jangkauan pelayanan keuangan pada nasabah yang berasal dari golongan masyarakat miskin (*the poor*), disamping itu harus tetap menjaga tingkat profitabilitasnya agar tetap berkelanjutan (*sustainable*). Terkait dengan hal tersebut, maka di Indonesia posisi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) menjadi strategis. BPR merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai misi

menjangkau masyarakat miskin (*social mission*), melalui pendekatan perbankan mikro (*microbanking*), yang lekat dengan tujuan pencapaian laba (*commercial mission*).

Perkembangan industri BPR di Indonesia mulai marak sejak dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) 1988 melalui Keppres No. 38 yang mendorong pendirian BPR-BPR baru. Selanjutnya landasan hukum nasional bagi operasionalisasi BPR disahkan pada tahun 1992 melalui terbitnya UU No. 7 / 1992 (yang diamandemen menjadi UU no. 10 / 1998) tentang Perbankan, yang didalamnya juga mengatur tentang BPR. Kemudian pada tahun 2009, tiga Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan MenegKop dan UKM) serta Gubernur Bank Indonesia mengeluarkan suatu Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, dimana di dalamnya tertuang rumusan langkah para pengambil kebijakan mengenai arah dan strategi pengembangan lembaga-lembaga keuangan mikro, termasuk BPR, di Indonesia mulai dari tahap perencanaan hingga tahap implementasi (lihat Lampiran 11).

Tabel 1.1 : Struktur perbankan di Indonesia (2008)



Jumlah BPR di Indonesia sampai dengan tahun 2008 mencapai 1897 (jumlah bank umum hanya 124), total asset gabungan secara nasional adalah Rp. 32 trilyun, dengan total permodalan sebesar Rp. 4,9 trilyun dan laba yang dihasilkan Rp. 849

milyar. Total kredit yang disalurkan mencapai Rp. 25 triliun sementara DPK (dana pihak ketiga) yang dihimpun adalah sebesar Rp. 22 triliun (sumber: Bank Indonesia).

Tabel 1.2 : Jumlah BPR berdasarkan total aset yang dimiliki (2008)

	Total Aset BPR Nasional (Rp)			
	< 1 Milyar	1 s/d 5 Milyar	5 s/d 10 Milyar	> 10 Milyar
Jumlah BPR	47	524	509	667

Sumber: BI (diolah)

Jika melihat jumlah BPR berdasarkan ukuran aset yang dimiliki, mayoritas BPR di Indonesia telah memiliki jumlah aset diatas Rp. 10 milyar (667 buah), sementara jumlah BPR yang paling sedikit adalah BPR yang beraset kurang dari Rp. 1 milyar (terdapat sebanyak 47 buah saja).

Tabel 1.3 : Perbandingan Kinerja Bank Umum dan BPR per Desember 2008

No	Kinerja	Perbankan Nasional	BPR
1	CAR	16,76%	23,33%
2	LDR	74,58%	82,58%
3	NPL	3,80%	9,88%

Sumber BI (diolah)

Jika melihat kinerja keuangan (*performance*) industri BPR nasional maka pencapaian kinerja keuangan BPR cukup baik. Pemenuhan persyaratan modal minimum (CAR) telah melampaui standar yang ditetapkan Bank Indonesia yakni 8%, dimana nilai CAR industri BPR mencapai 23,33%. Kemudian LDR (*loan to deposit ratio*) mencapai 82,58% artinya industri BPR cukup agresif menyalurkan kredit;<sup>1</sup> sementara rasio kredit bermasalah (NPL) pada tingkat 9,88% (rekomendasi BI maksimal hanya 5%).

<sup>1</sup> Fungsi pokok dari lembaga keuangan bank, termasuk BPR, adalah fungsi perantara atau intermediasi. Dimana fungsi intermediasi dari sebuah bank tercermin dari indikator LDR (*loan to deposit ratio*). Bank Indonesia menetapkan standar ideal bagi tingkat LDR adalah 80% - 110%. Jika LDR berada dalam rentang tersebut maka fungsi intermediasi bank tersebut berjalan baik. Jika LDR kurang dari 80% maka bank dikatakan *over liquid* dan mengalami *under-lending position*.

Tabel 1.4: Rerata perkembangan ukuran kredit BPR (nasional)

Des-06	Total Kredit	Rp 16.948.462.376.000
	Jumlah Rekening	2.470.681
	Rata-rata	Rp 6.859.834
Des-07	Total Kredit	Rp 20.584.086.656.000
	Jumlah Rekening	2.562.293
	Rata-rata	Rp 8.033.463
Des-08	Total Kredit	25.415.259.877.000
	Jumlah Rekening	2.681.764
	Rata-rata	Rp 9.477.068

Sumber: BI (diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara rata-rata terjadi peningkatan ukuran nilai nominal kredit yang diberikan oleh industri BPR sejak tahun 2006 dimana rata-rata ukuran kredit (*loan size*) hanya sebesar Rp. 6,8 juta, kemudian meningkat menjadi Rp. 8 juta di tahun 2007 dan meningkat lagi menjadi Rp. 9,4 juta di tahun 2008.

Data-data makro diatas memperlihatkan bahwa industri BPR di Indonesia secara umum mengalami peningkatan kinerja keuangan. Peningkatan kinerja ini bersamaan dengan adanya peningkatan indikator-indikator pokok misalnya total aset yang bertumbuh sebesar 21,5 % di tahun 2007 kemudian meningkat jadi 23,4% pada 2008.

Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti pemerintah (regulator), pengelola, pemilik, masyarakat dan akademisi memandang perlu untuk selalu dapat mengukur kinerja bank. Untuk mengukur peningkatan kinerja keuangan suatu bank (BPR dalam hal ini termasuk bank) maka dipergunakan berbagai indikator rasio, dimana sumber atau basis perhitungan adalah laporan keuangan. Indikator yang paling umum dipakai adalah rasio ROA dan rasio ROE.

Beberapa literatur seperti Berger (1995), Gilbert dan Wheelock (2007), Singh dan Chaundhary (2009), menyebutkan bahwa peningkatan kinerja keuangan (khususnya kinerja profitabilitas) sangat dipengaruhi oleh peningkatan indikator-indikator internal seperti pertumbuhan aset, perbaikan efisiensi serta optimisasi

pengelolaan aset. Disamping itu studi yang dilakukan Angkinand (2007) juga membuktikan bahwa faktor pemenuhan ketersediaan modal minimum dapat mengurangi resiko keuangan sehingga laba pun pada akhirnya dapat meningkat.

Namun seperti diuraikan pada bagian awal, bahwa BPR memiliki peran unik dan strategis yakni memiliki juga ‘misi sosial’ yang terefleksikan pada jangkauan pelayanannya (*service outreach*) terhadap masyarakat miskin. Banyak penelitian di Indonesia telah dilakukan untuk memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan suatu bank, termasuk BPR. Namun kemudian tujuan dari penelitian hanya sampai pada titik tersebut. Terdapat sedikit sekali penelitian tentang aspek jangkauan dari BPR. Padahal jika dikaitkan dengan peran ‘unik dan strategis’ BPR tersebut maka seyogyanya pembahasan melampaui domain pengukuran kinerja keuangan/profitabilitas *per se*,<sup>2</sup> tetapi juga masuk ke wilayah dampak dari peningkatan/perbaikan indikator-indikator kinerja tersebut terhadap aspek lain dari pelayanan dan jangkauan (*outreach*) BPR kepada nasabahnya.

Penelitian dengan tema pokok melihat hubungan (asosiasi) antara kinerja keuangan dengan jangkauan (*outreach*) telah dilakukan bagi Bank Dunia.<sup>3</sup> Studi tersebut menggunakan data *cross-section* (124 observasi) antar negara berkembang (49 negara) di lima regional yakni Eropa Timur/Asia Tengah, Sub-Afrika, Timur Tengah/Afrika Utara, Asia Selatan dan Asia Timur; dengan database antara tahun 1999-2002 (sebagian besar data berasal dari tahun 2002). Topik sentral penelitian tersebut adalah menemukan bukti bahwa kinerja keuangan sesungguhnya dapat sejalan (*go hand in hand*) dengan misi sosial; atau (sebaliknya) apakah justru terjadi pergeseran misi (*mission drift*) yakni terjadi *trade off* antara peningkatan kinerja profitabilitas dengan misi pelayanan kepada nasabah yang lebih miskin (yang di-proxy dengan ukuran nominal rata-rata kredit diberikan).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Dalam tesis ini istilah kinerja keuangan dan profitabilitas dipergunakan secara bergantian namun merujuk pada pengertian yang sama yakni indikator kinerja (*performance*)

<sup>3</sup> Sebuah paper dengan judul “*Financial Performance and Outreach: A Global Analysis of Leading Microbanks*” oleh Robert Cull, Asli Demirguc Kunt, dan Jonathan Murdoch (2006)

<sup>4</sup> Ukuran atau size dari pinjaman sering dijadikan *metric* dari kedalaman jangkauan (*depth of outreach*) atau level kemiskinan dari nasabah LKM yang terlayani.

Terjadinya pergeseran misi (*mission drift*) merupakan masalah yang menjadi fokus perhatian para pemerhati gerakan keuangan mikro dewasa ini. Jika seorang nasabah semakin berkembang dalam usahanya dan meminta kredit yang lebih besar kemudian BPR memberikan kredit dengan nominal lebih besar maka hal tersebut tidaklah dikatakan terjadi pergeseran misi. Pergeseran misi terjadi pada nasabah baru, yaitu kecenderungan pemberian kredit dengan nominal besar (untuk nasabah kurang miskin) dibanding kredit berukuran lebih kecil (untuk nasabah yang lebih miskin).<sup>5</sup> Atau pergeseran misi bisa juga terjadi pada nasabah lama melalui reorientasi dari nasabah yang lebih miskin ke yang lebih kaya.<sup>6</sup>

Hasil penelitian tersebut secara umum menyimpulkan bahwa tidak terdapat bukti yang kuat yang mengindikasikan terjadinya *trade off* antara kinerja profitabilitas dengan jangkauan (*outreach*), artinya bahwa misi pencapaian laba tinggi dapat berjalan bersamaan (*go hand in hand*) dengan misi sosial. Output dari penelitian, yang menggunakan metodologi analisa regresi linier, tersebut mengungkapkan bahwa lembaga yang memiliki profitabilitas yang baik tidak memiliki kecenderungan atau tidak signifikan untuk mengatakan bahwa fokus telah bergeser dari nasabah lebih miskin (*poorer*) kepada nasabah yang kurang atau tidak terlalu miskin (*less poor*).

---

<sup>5</sup> Beberapa LSM internasional seperti CARE International dan Mercy Corps yang mempunyai program pengembangan keuangan mikro di Indonesia, mendefinisikan nasabah miskin yakni orang-orang yang mendapatkan kredit dengan nominal dibawah Rp. 5 juta (*pro-poor credit*).

<sup>6</sup> Terdapat pengukuran tingkat kemiskinan dari nasabah suatu lembaga yang disebut *Social Performance Index* yang dikembangkan oleh CGAP, juga oleh Grameen Foundation.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dari berbagai paparan literatur dan teori yang mencoba melakukan analisis tentang kinerja keuangan suatu bank dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, penelitian ini pun mencoba merangkai kesimpulan dari berbagai referensi tersebut dengan industri BPR sebagai domain penelitian. Seperti disebutkan sebelumnya, kinerja profitabilitas suatu bank berhubungan erat dengan faktor-faktor internal seperti indikator ukuran lembaga, efisiensi operasi, pengelolaan asset, serta faktor ekuitas atau permodalan yang memadai.

Kemudian, mengingat visi serta misi dari BPR sendiri adalah melayani kegiatan UMK, terutama di pedesaan;<sup>7</sup> maka penelitian ini juga hendak mengukur atau lebih tepatnya melihat hubungan antara peningkatan indikator kinerja keuangan dengan berbagai indikator jangkauan pelayanan BPR kepada nasabahnya. Dalam hal ini yang dicari bukan pola hubungan yang bersifat deterministik namun eksplorasi lebih bersifat menggali hubungan asosiasi. Analisa lebih lanjut tentang signifikansi dan magnitude dari relasi tersebut dikembangkan bersama-sama dengan berbagai variabel kualitatif lainnya.

Oleh karena itu perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana korelasi atau hubungan empiris antara kinerja keuangan BPR dengan faktor-faktor internal yang dianggap mempengaruhi? Dan apakah faktor-faktor tersebut memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan?
2. Apakah dengan terjadinya peningkatan kinerja keuangan, BPR justru mengurangi jangkauannya (*outreach*) terhadap nasabah miskin yang dilayani? atau dengan kata lain apakah terjadi *trade off* antara pencapaian misi keberlanjutan (*sustainability*) dengan misi sosial? Apakah telah terjadi pergeseran misi (*mission drift*) dari tujuan melayani

---

<sup>7</sup> Bank Indonesia dalam Cetak Biru BPR (2006), mencanangkan Visi tentang BPR yaitu terwujudnya industri BPR yang sehat, kuat, produktif, dan dipercaya untuk melayani UMK dan masyarakat, khususnya di pedesaan guna mendukung pertumbuhan perekonomian daerah; dan Misi BPR yaitu menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan BPR kepada UMK dan masyarakat setempat, terutama di wilayah pedesaan

masyarakat termiskin (*depth of outreach*) kepada kepentingan menjaga keberlangsungan komersial (*commercial viability*)?

### 1.3 Ruang Lingkup/ Batasan Masalah

Ketika proposal penelitian ini disusun, terdapat keinginan untuk menjadikan seluruh wilayah Indonesia sebagai basis area penelitian. Namun kemudian fakta-fakta menunjukkan bahwa terdapat sejumlah 1897 BPR di seluruh Indonesia dengan pola distribusi yang tidak seimbang (sebagian besar atau lebih dari 70% terkonsentrasi di pulau Jawa). Dalam hal ini pemilihan sampel yang akan mewakili tiap-tiap provinsi tentu bukanlah hal yang mudah. Pertama, mengambil sampel dari seluruh wilayah Indonesia memang mungkin akan lebih “*representative*” sepanjang yang menjadi pertimbangan adalah populasi riset, namun ternyata BPR memiliki tingkat kekhasan (*locality*) berdasarkan wilayah masing-masing, sejalan dengan sejarah perkembangan BPR di tiap provinsi/daerah yang memang berbeda (terkait dengan kultur setempat)<sup>8</sup>. BPR yang berada di wilayah atau regional yang sama tentu akan memiliki akar sejarah pembentukan yang serupa, serta saling memiliki interaksi yang kuat dan saling mempengaruhi sehingga pola kecenderungan yang terbangun akan mudah untuk terlihat dan dianalisa. Kedua, pemilihan cakupan wilayah yang luas memang akan memperluas peluang untuk melakukan generalisasi atas temuan-temuan. Namun, studi dengan wilayah yang luas juga akan mengurangi tingkat akurasi dan detail informasi yang didapatkan. Fokus pada wilayah yang lebih kecil (terbatas) akan memudahkan penggalian informasi pendukung (*supporting information*) yang lebih dalam melalui observasi dan wawancara (penulis kebetulan juga seorang konsultan keuangan mikro yang bekerja dan berinteraksi dengan BPR di wilayah penelitian).

Penelitian ini mengemukakan gagasan bahwa terdapat hubungan yang erat dan dapat diukur antara kinerja keuangan BPR dengan beberapa faktor internal yang berpengaruh. Oleh karena itu ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas

---

<sup>8</sup> Contoh di Bali banyak BPR yang berasal dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dimiliki oleh masyarakat adat, demikian juga BPR di Sumatera Barat yang berakar dari Lembaga Pitih Nagari (LPN), serta di wilayah Jawa Barat terdapat Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK).

dalam penelitian ini hanya mencakup berbagai indikator/variabel internal yang dianggap berhubungan erat dengan kinerja keuangan BPR (diukur dengan ROA & ROE) yakni variabel besar/size suatu BPR (dilihat berdasarkan kategori total aset), variabel pengelolaan aset (*asset management*) yang diukur dengan rasio utilisasi aset serta rasio kredit bermasalah/*non performing loan* (kualitas dari kredit); variabel efisiensi operasional yang diukur dengan rasio *operating expense operating income* (OEOI), serta variabel kecukupan modal sendiri yang diukur dengan indikator *capital adequacy ratio* (CAR).

Selanjutnya eksplorasi terhadap hubungan antara kinerja keuangan (*profitability*) dengan jangkauan (*outreach*) yang berlandaskan pada referensi kerangka model penelitian yang telah ada sebelumnya (Cull, Kunt & Murdoch, 2006); maka lingkup dari pembahasan adalah mencakup variabel-variabel sebagai berikut:

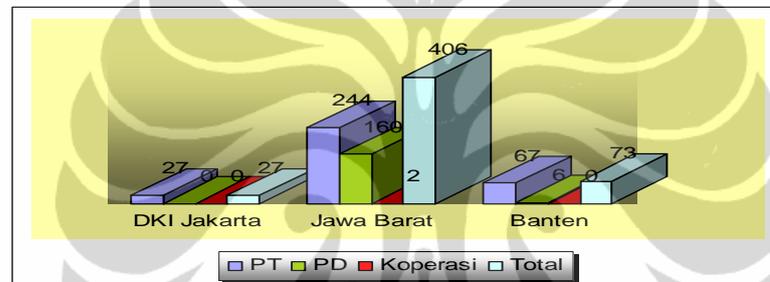
- Rasio tingkat bunga pinjaman (*Yield on Portfolio*)
- Rasio biaya personalia terhadap aset (*Labor Expense to Asset*)
- Rasio biaya umum terhadap aset (*General Expense to Asset*)
- Rasio beban bunga terhadap aset (*Interest Expense to Asset*)
- Jumlah kekayaan lembaga (*Total Asset*)
- Nilai nominal rata-rata pinjaman (*Size of Credit*)
- Rasio portofolio pinjaman terhadap aset (*Loan to Asset*)
- Bentuk dan kepemilikan lembaga (badan hukum)
- Wilayah operasional (pedesaan atau perkotaan)
- Metode peminjaman (individual atau berkelompok)

Pengambilan sampel data-data dalam penelitian ini adalah mencakup BPR-BPR di tiga provinsi yakni Provinsi Jawa barat, Jabodetabek dan Banten, dan bersumber dari laporan keuangan. Dimana database akan mengandung sebuah observasi untuk setiap BPR sehingga bersifat *cross section* data. Ketiga provinsi tersebut juga dipilih sebagai area penelitian karena dianggap mewakili wilayah-wilayah penting pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun juga memiliki konsentrasi penduduk miskin yang relatif besar Disamping itu perkembangan BPR relatif banyak di ketiga provinsi tersebut (27% dari total populasi BPR di Indonesia).

Ketiga sampel provinsi juga dianggap mengandung karakteristik dari populasi BPR yang diinginkan yakni BPR-BPR yang berlokasi di pedesaan dan di perkotaan. Sebagian besar BPR di Jawa Barat dan Banten dapat dianggap mewakili BPR yang berlokasi di daerah pedesaan (*rural area*), sementara BPR di seputar DKI (Jabodetabek) dianggap mewakili BPR yang berlokasi di wilayah perkotaan/pinggiran kota (*urban/sub-urban area*).

Berikut adalah gambaran mengenai perkembangan BPR di ketiga wilayah penelitian yakni Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten.

Grafik 1.1 : Jumlah BPR di tiga provinsi berdasarkan bentuk badan hukum (2008)



Sumber: BI, (Diolah)

Di DKI Jakarta terdapat 27 BPR dan seluruhnya berbentuk perseroan terbatas (PT). Di Jawa Barat terdapat 406 BPR, dimana yang berbentuk PT sebanyak 244, sebanyak 160 dimiliki pemda (PD), dan 2 berbadan hukum koperasi. Sementara Banten memiliki 73 BPR, 67 merupakan PT dan sisanya adalah PD.

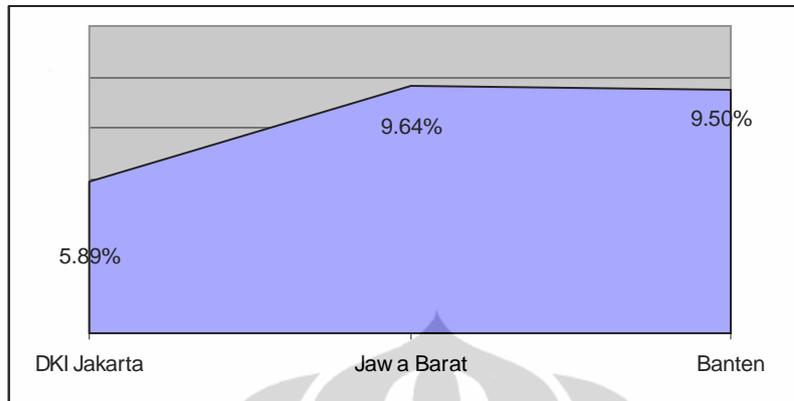
Tabel 1.5 : Indikator utama BPR di tiga provinsi (2008)

	DKI Jakarta	Jawa Barat	Banten	Jumlah	Total Nasional	Share
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)+(3)	(5)	(6) = (4) / (5)
Jumlah Aset	585,065,472	6,214,526,326	641,626,631	7,441,218,429	32,681,128,574	22.77%
Kredit	422,295,310	4,491,262,208	502,522,226	5,416,079,744	25,336,066,167	21.38%
DPK	297,500,467	4,394,939,957	328,179,116	5,020,619,540	21,790,463,125	23.04%

Sumber: BI (diolah)

Pangsa (*share*) dari industri BPR di ketiga provinsi terhadap industri BPR nasional berdasarkan total aset, kredit diberikan dan dana masyarakat yang dihimpun adalah masing-masing sebesar 22.8%, 21.4% dan 23%.

Grafik 1.2 : *Non Performing Loan* BPR di 3 Provinsi (2008)



Sumber: BI (diolah)

Jika melihat kinerja rasio kredit bermasalah (NPL) maka yang terbaik dari ketiga provinsi adalah DKI Jakarta sebesar 5,89% dibandingkan Jawa Barat 9,64% dan Banten 9,5%.

Tabel 1.6 : Penyaluran Kredit di 3 provinsi (Des. 2008)

Provinsi	Total Kredit	# Rekening	Rata-rata
DKI Jakarta	Rp 404.725.038.000	21.000	Rp 19.272.621
Jawa Barat	Rp 4.397.172.208.000	588.396	Rp 7.473.151
Banten	Rp 480.049.521.000	46.823	Rp 10.252.430

Sumber: BI, (diolah)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa rata-rata ukuran kredit BPR di provinsi-provinsi tersebut memang tidak terlampaui jauh dari rata-rata nasional (lihat tabel Rerata perkembangan ukuran kredit nasional sebelumnya), kecuali untuk provinsi DKI Jakarta yang rerata nilai kredit sebesar Rp. 19 juta per nasabah. Hal ini mungkin dikarenakan karakteristik Jakarta sebagai wilayah urban dan memiliki tingkat indeks biaya hidup lebih besar.

#### **1.4 Perumusan Hipotesis**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan terlebih dahulu, maka terdapat dua buah hipotesis alternatif yang akan diuji dalam penelitian ini.

Yang Pertama adalah:

*“Terdapat hubungan/korelasi yang positif antara kinerja keuangan BPR dengan faktor-faktor internal seperti ukuran/besar BPR, utilisasi aset, kecukupan modal serta hubungan yang negatif dengan jumlah kredit bermasalah, efisiensi operasional; dan faktor-faktor tersebut mampu memberikan perbedaan yang signifikan pada peningkatan kinerja keuangan”*

Yang Kedua adalah:

*“Jangkauan (outreach) pelayanan BPR kepada nasabah miskin, tidak berpengaruh terhadap perbaikan indikator kinerja keuangan; serta tidak terjadi gejala pergeseran misi (mission drift) pelayanan kepada nasabah miskin, terutama yang berada di wilayah pedesaan”*

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Oleh karena itu penelitian ini secara spesifik melalui pengujian data-data kuantitatif keuangan serta data-data kualitatif lainnya bertujuan untuk melihat:

1. Faktor-faktor yang dianggap berhubungan terhadap kinerja keuangan BPR dan bagaimana faktor-faktor tersebut memberi pengaruh/perbedaan yang signifikan terhadap kinerja keuangan tersebut.
2. Bagaimana tujuan komersil BPR agar dapat berkelanjutan (*sustainable*), seiring peningkatan kinerja keuangannya, bisa sejalan dengan misi sosial dari BPR yakni tetap memfokuskan diri pada pelayanan nasabah kecil dan masyarakat termiskin di dalam wilayah operasionalnya.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan nantinya dapat memberi manfaat sebagai input dalam merumuskan kebijakan atau memberikan rekomendasi dalam pengembangan keuangan mikro di Indonesia khususnya terkait dengan perbankan mikro yang dilaksanakan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Seperti diketahui fungsi dan peran BPR sebagai lembaga intermediasi keuangan, diharapkan bisa menjadi katalisator pengembangan ekonomi rakyat lapisan bawah terutama masyarakat pedesaan. Penguatan kelembagaan industri BPR berarti membangun sebuah struktur sistem keuangan yang kuat pada level atau lapisan yang langsung bersinggungan dengan usaha-usaha kecil dan mikro yang merupakan kegiatan atau aktifitas ekonomi mayoritas rakyat Indonesia. Disinilah regulator mengambil peran sebagai pembuat *policy* yang tepat berkaitan industri BPR itu sendiri, sebagai bagian dari sistem *channel* kebijakan sektor moneter bagi pertumbuhan output nasional.

Bagi dunia akademis dan keilmuan, tesis ini diharapkan nantinya menjadi salah satu sumber tambahan referensi literatur tentang dunia keuangan mikro di Indonesia khususnya terkait perbankan mikro oleh BPR. Dimana literatur semacam ini belum menjadi topik pembahasan yang khusus, terutama pada perkuliahan tentang industri perbankan di Indonesia pada umumnya. Sehingga dengan semakin banyaknya literatur semacam ini maka akan makin menarik minat banyak mahasiswa untuk mempelajari dan mengembangkan dunia keuangan mikro dan sistem perbankan mikro, yang bercirikan ke-Indonesia-an dan mengandung unsur kearifan lokal. Untuk itu penelitian lebih lanjut tentang topik yang berkaitan akan sangat bermanfaat bagi khazanah dan pustaka keilmuan, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi cita-cita menjadikan keuangan mikro sebagai salah satu alat/kendaraan efektif pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Bagi kalangan praktisi dan para pemangku kepentingan lainnya dunia keuangan mikro, serta khususnya kalangan industri BPR, tesis ini diharapkan akan menambah masukan di dalam perbaikan proses pengambilan kebijakan internal dan eksternal BPR. Kebijakan internal yakni proses manajemen serta tata kelola (*good corporate governance*) yang lebih baik. Kebijakan eksternal adalah kepekaan terhadap lingkungan dan pasar sasaran (*target market*) tradisional BPR, yaitu kalangan masyarakat miskin yang memerlukan akses pelayanan keuangan.

Bagi penulis, tesis ini merupakan media dan kesempatan pembelajaran yang sangat penting terutama mengenai penggalian informasi-informasi lebih jauh tentang dunia keuangan mikro dan industri BPR. Kemudian pemakaian perangkat analisa teknis, metodologi yang terukur, disertai kemampuan interpretasi atau penjelasan yang bersifat akademis akan sangat berguna bagi pengembangan wawasan pribadi.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penyusunan tesis ini akan terbagi kedalam 5 bab yang terdiri dari:

- Bab Pertama, menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, Ruang lingkup/pembatasan masalah, perumusan hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematik penulisan
- Bab Kedua, membahas tentang tinjauan kepustakaan/literatur/landasan teoritis tentang laporan keuangan bank, pengukuran kinerja keuangan, literatur dan penelitian yang membahas kinerja keuangan dan dampaknya, keuangan mikro dimana diuraikan tentang prinsip-prinsip universal dan metode pendekatan dalam keuangan mikro, sejarah dan perkembangan BPR
- Bab Ketiga, membahas tentang metodologi penelitian, pemodelan persamaan berdasarkan literatur yang telah ada, dan penentuan variabel dan definisi dari masing-masing variabel, jenis data dan sumber data, serta berbagai teknik-teknik dan modifikasi yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
- Bab Keempat, menjelaskan tentang analisis data yang dilakukan, parameter-parameter pengujian, penarikan hubungan antar variabel-variabel, serta interpretasi dari hasil-hasil yang diperoleh.

- Bab Kelima, berisi kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian agar kinerja keuangan BPR dapat semakin baik, disamping itu juga berkaitan dengan tujuan sosial yang dimilikinya yakni jangkauan (*outreach*) pelayanan. Disertakan juga saran-saran perbaikan yang kiranya diperlukan agar penelitian ini bisa lebih baik dengan hasil yang lebih memuaskan.

